

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat.

Sedangkan Hans Kelsen (dalam Ujang, 2009:20) menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi”. Perubahan mendasar yang terjadi pada era otonomi ditandai dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan berlakunya UU No. 33 tahun 2004 membawa perubahan yang mendasar dalam pola pengelolaan pemerintahan di daerah. Tujuan utama diberlakukannya kedua undang-undang ini adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membentuk daerah yang otonom yang mandiri dengan sumber dana dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang jelas dan memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya.

Bagir Manan dalam Agus (2004:17) mengatakan “otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”. Sedangkan Mardiasmo (2002) berpendapat:

Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga, perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat

membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali yang kemudian diikuti dengan pemerintahan wirausaha untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik.

Dari pendapat beberapa ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian mengurus dan mengatur urusan pemerintah sendiri berdasarkan dari perpaduan ide desentralisasi dan demokrasi.

2.1.2 Desentralisasi

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa:

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ujang (2009:22) menyatakan:

Desentralisasi merupakan salah satu wujud dari negara hukum yang tercermin dari adanya pembatasan kekuasaan pemerintah serta wujud demokratisasi yang tercermin dari adanya akses dan keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desentralisasi merupakan sarana pembagian kekuasaan antara pemerintah kepada pemda, sehingga menjadi media pengatur hubungan antara level pemerintah (*intergovernment*) dalam lingkup suatu negara. Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001) :

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mem-pengaruhi daerah atau wilayah.
2. Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
3. Pengetahuan lokal (lokal knowledge), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll.
4. Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

2.1.3 Teori Transfer

Definisi transfer menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu: “transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari satu entitas pelapor dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan”. Transfer dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat kepada daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan transfer menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu :

1. Transfer tanpa syarat (*Unconditional grant*);
Transfer tanpa syarat merupakan bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah dapat menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan. Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri atau sesuai dengan aturan yang menjadi prioritas daerahnya. Pemerintah pusat tidak terlibat langsung dalam menentukan pengalokasian bantuan tersebut.
2. Transfer dengan syarat (*conditional grant*).
Transfer dengan syarat merupakan bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa- jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Transfer ini digunakan untuk membiayai program-program yang dianggap penting oleh pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat tersebut misalnya program KB, imunisasi dan lain sebagainya. Transfer ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:
 - a. Transfer pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah dana pendapatan daerahnya untuk penyelenggaraann urusan tersebut dengan baik. Transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut. Transfer penimbang ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transfer penimbang tidak terbatas dan transfer penimbang terbatas.
 - b. Transfer bukan pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pemerintah.

2.2 Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Badrudin (2012:7) mengatakan bahwa:

Flypaper effect adalah adanya perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan).

Menurut Nila Aprilla (2013:17) mendefinisikan *flypaper effect* sebagai berikut:

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah dana transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan sendiri. Beberapa studi menunjukkan perbedaan dana transfer dengan dana sendiri memang terjadi.

Sedangkan menurut Oates (dalam Halim, 2006) menyatakan bahwa ketika “respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect*”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *flypaper effect* adalah kondisi yang menunjukkan semakin besarnya respon belanja pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

2.3 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa “dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut (Halim, 2004) menjelaskan bahwa:

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. **Bagi Hasil Pajak**, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. **Bagi Hasil Bukan Pajak**, terdiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, dan penerimaan

dari iuran eksplorasi.

3. **Dana Alokasi Umum**

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No. 104 Tahun 2000.

4. **Dana Alokasi Khusus**

DAK adalah dana yang bersal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

5. **Dana Darurat**, terdiri atas Dana Kontingensi. Dana Kontingensi yaitu dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tidak terduga atau tidak diharapkan.

Sedangkan menurut Machfud (dalam Ujang, 2009:148) mengatakan “dana perimbangan sebagai transfer dana pemerintah pusat kepada daerah (*intergovernmental fiscal transfer*) berbentuk DAU dan DAK.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan dana perimbangan adalah transfer dana pemerintah pusat kepada daerah yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah.

2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil didefinisikan:

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber penerimaan pusat di daerahnya meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh Perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penrimaan dari sumber daya.

Sedangkan menurut Solihin dalam Saputri (2014:17) DBH merupakan “dana perimbangan pemerintah pusat yang memiliki persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam APBN”. Selanjutnya menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 Ayat 2 dinyatakan bahwa:

- Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.

Menurut Widarnarto (2015) dana bagi hasil yang selanjutnya disebut DBH merupakan “penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah bagi hasil pajak dan non pajak yang berasal dari hasil pembagian penerimaan pusat dan provinsi yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.” DBH dilakukan berdasarkan prinsip daerah penghasil yang disalurkan berdasarkan bagian daerah pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan definisi dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil dengan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2016:127) mengatakan “dana alokasi umum adalah transfer transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

Dana alokasi umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sementara Machfud dalam Ujang (2009:152) memberikan definisi DAU sebagai:

- 1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*)
- 2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
- 3. *Equalization grant* berfungsi untuk menetralisasi ketimpangankemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan definisi dana alokasi umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional pemerintah.

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Mahmudi (2016:139) menyatakan bahwa :

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah- daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Jumlah alokasi anggaran masing-masing bidang DAK yang dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan nasional

yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan usulan masing-masing daerah. Adapun cara perhitungan alokasi DAK (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD (Listiorini, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan definisi dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai prioritas nasional.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyatakan:

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sutrisno (dalam Siallgan, 2016) “pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.”

Sedangkan menurut Widarnarto (2015:19) mengatakan:

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang di peroleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut dengan menerbitkan peraturan daerah dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu:

a. Pajak Daerah;

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Retribusi Daerah;
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,
Penganggaran yang dihasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- d. Lain-lain PAD yang sah;
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26, Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.8 Belanja Daerah

Menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 “Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan Halim (2002) mendefinisikan “belanja daerah sebagai pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”.

Menurut IASC Framework, Biaya/Belanja Daerah merupakan:

penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana.

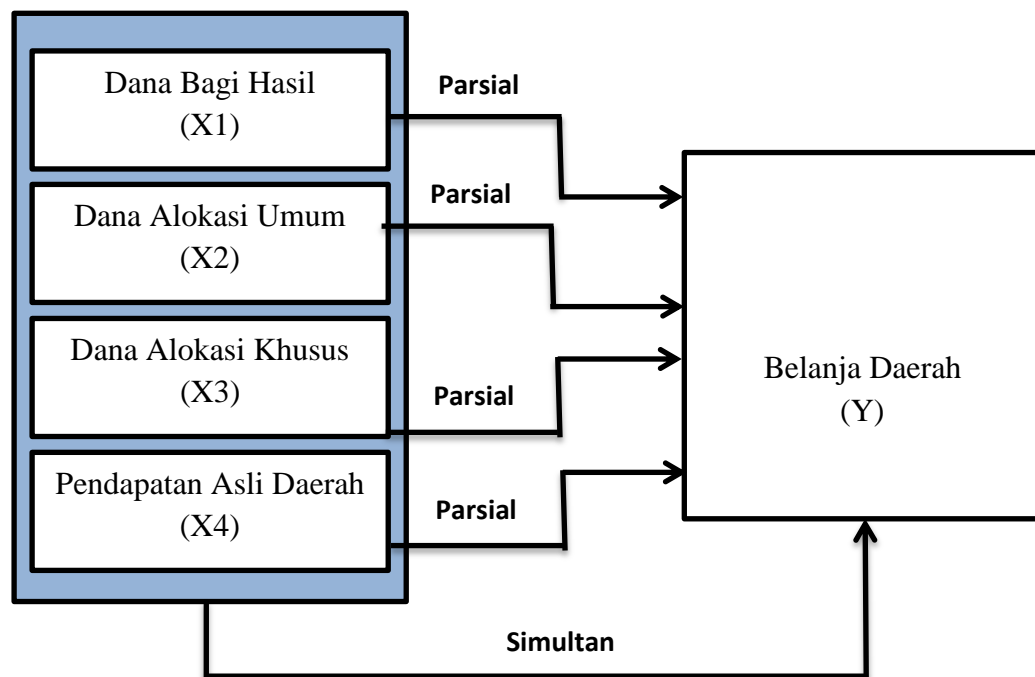
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD dan kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berbentuk penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

2.9 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2014:60) menjelaskan bahwa: “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset.” Berikut ini pengaruh dari setiap variable yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah.



Gambar 2.1
Kerangka berpikir

Peneliti mengidentifikasi 4 variabel penelitian yaitu dana bagi hasil (X1), dana alokasi umum (X2), dana alokasi khusus (X3), pendapatan asli daerah (X4) dan belanja daerah (Y). Dari gambar 2.1 kerangka konseptual dapat diuraikan

bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja daerah.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Fitri Amalia (2015)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten	Variabel 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Belanja Daerah	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta Perbedaan lokasi penelitian	1. DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, 2. Secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. 3. Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2013.
2.	Muhamad Armawaddin (2015)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara	Variabel: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Alokasi Umum (DAU). 3. Belanja Daerah	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian	Adanya <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dalam periode 2010-2013.
3.	Imam Santoso,dkk (2015)	Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung	Variabel: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Dana Bagi Hasil (DBH) 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Belanja Daerah	Peneliti menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	PAD, DBH, dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung:

4.	Wiwin Anggriani Salawali, dkk. (2014)	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah.	Variabel: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Belanja Daerah (Y)	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan terjadi <i>flypaper effect</i> .
5.	Diana Fitri (2014)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap <i>Flypaper Effect</i> (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera 2008-2012)	Variabel 1. <i>Flypaper Effect</i>	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	1. Belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap fenomena <i>flypaper effect</i> . 2. Belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap fenomena <i>flypaper effect</i> .
6.	Listiorini (2012)	Fenomena <i>Fly Paper Effect</i> pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Variabel: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) , 2. Dana Alokasi Khusus (DAK), 3. Dana Bagi Hasil (DBH), 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD). 5. Belanja Daerah	Perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	1. Secara simultan, terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah. 2. Secara parsial, terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

					signifikan terhadap belanja daerah, dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
7.	Irham Iskandar (2012)	<i>Flypaper Effect</i> pada <i>Unconditional Grant</i>	Variabel (X): 1. <i>Unconditional Grant</i> , 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3. Belanja Daerah	Variabel PDRB dan perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	<p>1. Unconditional grants berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah.</p> <p>2. PDRB berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah.</p> <p>3. Kedua, nilai koefisien pendapatan daerah lebih besar dari unconditional grants dan keduanya signifikan. Ini menunjukkan tidak terjadinya flypaper effect di provinsi Jawa Barat.</p>
8.	Afrizawati (2012)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera	Variabel 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Pendapatan Asli	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi	1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

		Selatan	Daerah (PAD) 3. Belanja Daerah	Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah tujuh Kabupaten/kota induk di Sumatera Selatan. 2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah tujuh Kabupaten/kota induk di Sumatera Selatan.
9.	Hadi Sasana (2010)	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia	Variabel: 1.Dana Alokasi Umum (DAU), 2.Dana Bagi Hasil (DBH), dan 3.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Belanja Daerah	Peneliti menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	1. Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 2. Terdapat fenomena <i>flypaper</i>

					<i>effect</i> dalam kinerja anggaran pemerintah provinsi.
10.	Siti Maimunah (2006) (Simposium Nasional Akuntansi 9)	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera	Variabel: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Belanja Daerah	Peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	<p>1. DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif) serta terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.</p> <p>2. Terdapat pengaruh flypaper effect dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan.</p> <p>3. Tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera.</p> <p>4. Tidak terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah bidang pendidikan dan telah terjadi</p>

					flypaper effect pada Belanja Daerah bidang kesehatan dan pekerjaan umum.
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah peneliti(2017)

2.11 Hipotesis

2.11.1 Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dari Transfer tanpa syarat (unconditional grant) yang ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Kemampuan fiskal merupakan isu penting dan strategis, karena di masa mendatang pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi bahkan melepaskan ketergantungannya secara finansial kepada pemerintah pusat. Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Diduga terdapat pengaruh dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

2.11.2 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka kemungkinan besar Dana Alokasi Umum ikut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal, hal ini tidak jauh beda dari

peran Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Diduga terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

2.11.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka dana alokasi khusus kemungkinan ikut berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan karena nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Yang berarti tidak boleh disalahgunakan yang digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Diduga terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

2.11.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan memicu, mencerminkan serta kecukupan dalam membiayai belanja daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung beban dan membiayai kewajiban belanja daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah, sangat membantu dalam belanja pemerintah daerah terutama dalam pembangunan daerah menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Iskandar (2012) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan berpengaruh positif pada belanja publik. Bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan

peningkatan pertumbuhan belanja daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₄ : Diduga terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

2.11.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Keempat variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang langsung dengan variabel dependennya yaitu belanja daerah. Menurut Listiorini (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₅ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.